

# PEMENUHAN HAK DISABILITAS PERKOTAAN DALAM KESETARAAN AKSES EKONOMI

## *FULFILLMENT OF URBAN DISABILITY RIGHTS IN EQUAL ECONOMIC ACCESS*

**Lusi Andriyani**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta,  
Jl. KH Ahmad Dahlan, Cierendeu, Tangerang Selatan, Indonesia 15419

**E-mail:** lusi.andriya@umj.ac.id

### **Abstrak**

Kelompok disabilitas netra saat ini perlu mendapatkan perhatian khusus agar mereka mempunyai kemandirian dan kekuatan untuk mengakses kesetaraan di bidang ekonomi. Tujuannya supaya mereka mampu survive untuk kehidupan keluarga. Dalam UU No 8 Tahun 2016, disabilitas merupakan subjek pembangunan. Dengan demikian keberadaannya harus dipertimbangkan sebagai salah satu penentu keberhasilan pembangunan. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik tahun 2020 Sebanyak 28,37 persen atau 6,38 juta penyandang disabilitas dari 273,5 juta penduduk. Penyandang disabilitas berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomi sehingga rentan akan keterpurukan ekonomi. Penyandang disabilitas mempunyai kecenderungan rentan terhadap ketersediaan akses pasar tenaga kerja untuk itu perlu pemetaan faktor-faktor penting dalam penguatan pemberdayaan bagi disabilitas. Kajian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan literatur review sebagai sumber data. Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran pustaka dan literatur terkait dengan peran disabilitas netra. Temuan dalam kajian ini adalah pemetaan faktor-faktor penting dalam upaya penguatan program pemberdayaan disabilitas netra, yaitu; Pentingnya persepsi positif dari masyarakat umum terhadap disabilitas netra dalam dunia kerja, pentingnya kesesuaian program bagi disabilitas netra, membangun motivasi berdaya saing dan jejaring, penguatan untuk mendapatkan kesetaraan ekonomi. Dengan demikian akan terbangun jaringan disabilitas netra yang mendukung kegiatan usaha secara bersama-sama.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan disabilitas, dunia kerja, motivasi berdaya saing, jaringan disabilitas.

### **Abstract**

*Blind groups need special attention so that they have the independence and power to equal economic. The goals is that they are able to survive in providing family life. In law No. 8 of 2016, disability is a subject of development. Thus, people with disability is one of the significant factors that determine the success of development. Based on the records of the Central Statistic Agency in 2020, as many as 28.37 percent or 6.38 million disabilities of the 22.5 million people. Persons with disabilities try to bear the economic risks so that they are vulnerable to economic downturn. They also have the tendency to be vulnerable in accessing available labor market. Therefore, it is necessary to map the important factors in strengthening the empowerment of people with disability. This study is a qualitative research using literature review as the data source. The validity of the data in this study was carried out through a search of literature related to the role of people with visual impairment. The findings in this study are the important factors in strengthening the empowerment program for people with visual impairment, namely; the importance of positive perceptions from the general public towards people with visual impairment in working situation, the importance of program suitability for people with visual impairment, building competitive motivation and networking, and strengthening for economic equality. Thus, the supporting network among people with visual impairment that will assist them in economic activities will be established.*

**Keywords:** Empowerment blind group, employment, competitive motivation, disability network.

## PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas netra merupakan kelompok yang harus mendapatkan perhatian khusus supaya mereka mempunyai kemandirian dan kekuatan untuk mengakses kesetaraan di bidang ekonomi. Program keterbukaan akses ekonomi produktif bagi disabilitas netra harus mendapatkan perhatian pemerintah, sehingga mereka mampu *survive* untuk kehidupan keluarga.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas sendiri telah dijelaskan bahwa pengertian Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Sementara pengertian pemberdayaan bagi disabilitas adalah upaya untuk menguatkan keberadaan penyandang disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok penyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri. Salah satu ragam disabilitas yang dikaji adalah disabilitas netra. Disabilitas netra merupakan salah satu bagian dari ragam disabilitas sensorik yang menjadi fokus kajian.

Dijelaskan dalam UU No 8 Tahun 2016 bahwa disabilitas khususnya disabilitas netra dalam kajian ini merupakan subjek pembangunan. Dengan demikian keberadaan penyandang disabilitas netra harus dipertimbangkan sebagai salah satu penentu keberhasilan pembangunan yang dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat (Ndaumanu, 2020).

Dalam UU No 19 Tahun 2011 juga telah dijelaskan bahwa negara mempunyai kewajiban

untuk merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas netra, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas netra dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi (Ndaumanu, 2020).

Kajian terkait disabilitas telah memberikan informasi bahwa hadirnya perilaku diskriminatif terhadap penyandang disabilitas pada umumnya hadir karena pemahaman yang negatif terkait apa itu disabilitas dan siapa penyandang disabilitas [3]. Kondisi ini didasari oleh pola pikir masyarakat yang masih didominasi dengan pemikiran normalitas. Pemikiran yang melihat bahwa orang yang mempunyai kondisi tubuh yang berbeda dari masyarakat pada umumnya masih belum dapat diterima oleh masyarakat umum. Sehingga mengakibatkan pada pembedaan posisi dan peran secara umum di masyarakat (Widinarsih, 2019).

## PEMBAHASAN

### Posisi Pekerja Disabilitas di Indonesia

Berdasarkan catatan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 22,5 juta penyandang disabilitas. Angka tersebut menggambarkan jumlah keseluruhan penyandang disabilitas, termasuk di dalamnya disabilitas netra. Dari jumlah tersebut 265.500 atau 1,18 persen masyarakat Indonesia penyandang disabilitas yang bekerja di usia 15 pada tahun 2020. Sebanyak 6.383.250 atau 28,37 persen penyandang disabilitas berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomi sehingga rentan akan keterpurukan ekonomi. Dan sebanyak 4.653.000

atau 20,68 persen disabilitas bekerja sebagai buruh/karyawan atau pegawai.

Komposisi pekerja secara keseluruhan terdapat 265.500 penyandang disabilitas. dari data tersebut, berdasarkan jenis kelamin mencapai 42.750 atau 0,19 persen laki-laki dan 36.000 atau 0,16 persen perempuan penyandang disabilitas dengan berbagai lapangan usaha. Lapangan dibidang jasa memiliki porsi lebih banyak 117.589 atau 44,29 persen dibandingkan dengan dibidang pertanian dan industri yang hanya 105.323 atau 39,67 persen dan 42.586 atau 16,04 persen. Komposisi dunia kerja bagi penyandang disabilitas, hanya mendapat akses pada beberapa bidang saja seperti jasa, pertanian dan industry (BPS, 2021). Untuk itu perlu dibuka kesempatan yang sama didunia usaha bagi disabilitas netra, dengan tetap mempertimbangkan kompetensi dan juga memperhatikan hak disabilitas netra. Kompetensi dapat hadir melalui program pelatihan kerja bagi disabilitas netra.

Penyandang disabilitas netra mempunyai kecenderungan rentan terhadap ketersediaan akses pasar tenaga kerja. Kondisi tersebut disebabkan karena penyandang disabilitas masih mempunyai pendidikan yang rendah serta mempunyai keterbatasan pada akses pasar tenaga kerja (Yusida Imran, n.d 2019). Hal ini semakin menguat pada saat kondisi biaya hidup sehari-hari semakin naik. Tingginya biaya hidup terutama yang berkaitan dengan kebutuhan kesehatan dan pendukung disabilitas seperti alat bantu dan perawatan kesehatan. Penyebab kerentanan penyandang disabilitas netra dalam mengakses ekonomi dipengaruhi juga oleh gender. Berdasarkan kajian, kerentanan lebih dialami oleh penyandang disabilitas netra perempuan. Dengan demikian dibutuhkan adanya penguatan program perlindungan sosial secara cepat dan tepat (Salsabila, Krisnani, & Apsari, 2019).

Kondisi rentan secara ekonomi yang dialami oleh penyandang disabilitas netra, semakin berat

pada saat kondisi dan situasi negara mengalami bencana seperti pada saat situasi Covid-19 saat ini. Berdasarkan survei sosial ekonomi nasional tahun 2020, terdapat 6,2 juta orang penyandang disabilitas dengan status disabilitas sedang dan berat (Mutia, 2021). Jumlah di atas perlu mendapat perhatian khusus seiring dengan upaya pemulihan ekonomi masyarakat. Dari kondisi tersebut *stakeholder* harus mampu mengembangkan program dan melakukan intervensi sesuai dengan kondisi dan potensi penyandang disabilitas netra sebagai upaya strategi jangka panjang untuk penguatan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

Berdasarkan hasil Survei Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas di era covid-19 dari laman bappenas.go.id pada tahun 2021 didapatkan data bahwa pendapatan bagi penyandang disabilitas mengalami penurunan sebesar 86 persen, di mana secara umum penyandang disabilitas berada disektor informal. Penurunan tersebut juga dipengaruhi oleh peraturan yang diberlakukan pada kondisi covid-19 dengan peraturan pembatasan interaksi. Mengingat jenis pekerjaan yang dijalankan oleh penyandang disabilitas netra khususnya lebih banyak pada kebutuhan interaksi aktivitas sosial. Dengan peraturan untuk menjaga jarak dan pembatasan aktivitas sosial mengakibatkan penyandang disabilitas netra yang kebanyakan berprofesi sebagai terapis pijat serta usaha dagang semakin berkurang penghasilannya.

Dalam kondisi masyarakat dengan situasi khusus/krisis terdapat data bahwa penyandang disabilitas netra perempuan mengalami tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penyandang disabilitas netra laki-laki. Dalam kondisi normal, penyandang disabilitas netra perempuan mengalami banyak tekanan secara finansial dan psikologis. Kondisi krisis covid-19 semakin membuat penyandang disabilitas netra perempuan terpuruk. Kondisi covid-19 juga mengharuskan penyandang disabilitas netra untuk bisa mengikuti perubahan

pola kerja tersebut. Keterbatasan akses teknologi juga menjadi hambatan tersendiri bagi penyandang disabilitas netra untuk bisa mengikuti perubahan dan pola kerja.

Hasil Survei Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas di era covid-19 juga menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap kekuatan ekonomi yang dihasilkan dari program perlindungan sosial yang berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang didanai dari program dana desa. Survei juga menggambarkan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan juga pemangku kepentingan di tingkat daerah dalam menjangkau penyandang disabilitas khususnya disabilitas netra sebagai kelompok rentan untuk mendapatkan bantuan (Waruwu & Adhi, 2019).

Dalam melihat kerentanan ekonomi penyandang disabilitas, khususnya disabilitas netra perlu dilihat beberapa rekomendasi: (1) Ketersediaan akses perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar. (2) Keterjangkauan akses informasi bagi penyandang disabilitas untuk dapat mengakses program perlindungan sosial. (3) Terdapat akses kesehatan yang mudah bagi penyandang disabilitas melalui jaminan kesehatan masyarakat. (4) Kemudahan akses bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan alat bantu dan program rehabilitasi berbasis masyarakat. (5) Kemudahan untuk mengakses pendidikan inklusif dengan terpenuhinya infrastruktur dan pendidik yang sesuai. (6) Kemudahan akses penyandang disabilitas di pasar tenaga kerja. Kemudahan akses untuk mendapatkan pekerjaan menjadi bagian penting dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2018, 30,38 juta jiwa terdapat 6,653.220 jiwa atau 21,9 persen yang bertempat tinggal di perkotaan dan 6.713.980 jiwa atau 22,1 persen di pedesaan (Pusat Data dan

Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2018). Dengan angka 21,9 persen dari jumlah penyandang disabilitas di perkotaan, menjadi perhatian penting bagi wilayah perkotaan untuk tetap memperhatikan penyandang disabilitas dalam aspek ketersediaan akses ekonomi terutama untuk mendapatkan pekerjaan.

Keberadaan komunitas disabilitas di perkotaan diwujudkan dalam bentuk kegiatan sukarela yang diwadahi melalui kegiatan ekonomi dan sosial yang dikelola oleh disabilitas netra. Keberadaan komunitas ini memungkinkan untuk dikembangkan sebagai salah satu model dalam program pemberdayaan disabilitas terutama disabilitas netra di perkotaan (UMJ, 2021).

Komunitas disabilitas sebagai bagian kecil dari perwujudan komunitas yang ingin berdaya dan mendapatkan akses ekonomi. Pada saat ini, komunitas tersebut masih belum optimal untuk menjadi pendorong bagi disabilitas netra lainnya dalam memberdayakan diri untuk bisa mendapatkan akses ekonomi. Kelompok ini membutuhkan dukungan dan pendampingan untuk bisa kuat dan mandiri dan merangkul disabilitas netra lainnya.

Secara psikologis kebutuhan disabilitas netra membutuhkan upaya yang kuat dalam internal individu penyandang disabilitas netra. Perlu *self talk* sebagai proses untuk membangun kepercayaan diri dan melawan faktor penghambat bagi penerimaan diri dari penyandang disabilitas netra, terutama berkaitan dengan sisi emosi dan pikiran yang negatif (Wulandari, 2017). Kondisi ini sangat dibutuhkan dalam upaya kemandirian disabilitas netra untuk bisa berperan untuk mengakses pekerjaan atau berkreaitivitas dalam upaya mengakses ketersediaan ekonomi.

Disabilitas netra secara tidak langsung juga dituntut untuk memiliki kreativitas dan kemampuan membuat sesuatu yang bernilai ekonomi. Upaya tersebut membutuhkan jejaring dan koneksi yang kuat supaya bisa mendukung

ketercapaian program yang dirancang dengan memiliki kesetaraan yang kuat dengan pelaku usaha kecil lainnya (Sukmana, 2018).

Kajian tentang disabilitas netra dalam pemenuhan hak akses ekonomi diharapkan mampu menghasilkan pemetaan terkait dengan faktor-faktor penting yang harus diperhatikan dalam upaya penguatan program pemberdayaan disabilitas netra (Istifarroh & Nugroho, 2019). Dengan pemetaan diharapkan program lebih fokus dan optimal.

Dari pemberdayaan yang dilakukan terhadap disabilitas netra diharapkan mampu menginisiasi terbangunnya komunitas disabilitas yang lebih mandiri, melalui kegiatan berwirausaha pada komunitas disabilitas netra khususnya di perkotaan, serta mendorong kepedulian masyarakat terhadap komunitas disabilitas netra di perkotaan.

### **Pemberdayaan Disabilitas Netra**

Konsep pembangunan manusia seutuhnya akan dapat terwujud apabila terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani. Untuk itu perlu dibangun keseimbangan peran didalam masyarakat (Hadi, 2015). Keberadaan peran yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan kompetensi mendorong program-program pemberdayaan. Hadirnya program pemberdayaan bagi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk membangun keselarasan hidup.

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) yang dilakukan terhadap disabilitas netra dalam kajian ini mengarah pada upaya pemberdayaan melalui program-program pemerintah yang mampu mendorong kemandirian disabilitas netra. Khususnya dalam mengakses kesetaraan ekonomi melalui keterbukaan akses di dunia kerja dan usaha. Dalam kajian ini, konsep pemberdayaan disabilitas netra akan selalu berkaitan dengan keberlanjutan program yang membutuhkan faktor pendukung utama seperti

kemampuan untuk mandiri secara ekonomi, ekologi dan sosial (Noor, 2018).

Pemberdayaan bagi disabilitas netra merupakan konsep yang seiring dengan pembangunan ekonomi yang membangun paradigma dan pemikiran baru yang menjadikan manusia sebagai subjek, berpartisipasi, pemberdayaan dan keberlangsungannya.

Konsep pemberdayaan menekankan pada peran manusia sebagai subjek. Adapun faktor lain merupakan stimulus atau perangsang bagi membangun semangat, rasa dan dorongan pada diri manusia untuk mengembangkan dirinya berdasarkan potensi yang dimiliki (Pravitasari, Soeaidy, & Hadi, 2014). Dengan demikian program pemberdayaan yang dijalankan oleh masyarakat merupakan proses memberikan kemampuan masyarakat agar dapat berdaya dan memotivasi dirinya untuk menentukan pilihan hidupnya.

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk mencapai keadilan sosial. dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah-langkah kecil guna tercapainya tujuan yang lebih besar (Pravitasari et al., 2014).

Menurut Susiladiharti dalam Huraerah (2016) yang dikutip dalam Pedoman Pemberdayaan Kementerian Sosial, tingkatan keberdayaan masyarakat dibagi dalam lima hal; 1) masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasar, 2) masyarakat mampu mengakses layanan publik dengan mudah, 3) masyarakat menyadari akan kekuatan dan kelemahan pada diri dan lingkungannya. 4) masyarakat mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang bermanfaat di masyarakat luas, 5) masyarakat mampu mengevaluasi dan mengendalikan berbagai program dan kebijakan institusi dan pemerintahan (Pravitasari et al., 2014).

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan kajian disabilitas perkotaan. Data penelitian juga diperoleh melalui kajian pustaka dan *literature review* yang berasal dari jurnal, data sekunder dan laporan kegiatan. Dalam proses analisis data menggunakan domain dengan memetakan hasil dari data sekunder dan literatur review untuk bisa disajikan dan dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan terakhir dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2016).

Kajian pemberdayaan disabilitas netra dalam pemenuhan hak kesetaraan ekonomi menghasilkan pemetaan faktor-faktor penting dalam upaya penguatan program pemberdayaan disabilitas netra.

Faktor tersebut adalah: 1) Persepsi masyarakat terhadap disabilitas netra, 2) Motivasi berdaya saing dan membangun jejaring bagi penyandang disabilitas netra, 3) Strategi penguatan untuk mendapatkan kesetaraan ekonomi, 4) Kesesuaian program pemberdayaan dengan kebutuhan, kemampuan penyandang disabilitas



**Bagan 1.** Faktor Yang berpengaruh pada Penguatan Pemberdayaan

**Persepsi Masyarakat Terhadap Disabilitas**

Terdapat beberapa kajian yang telah menekankan pada proses pemberdayaan disabilitas netra. Pertama, terkait dengan faktor

pendorong serta penghambatnya program pemberdayaan, seperti yang dilakukan oleh Paguyuban Sehati di Sukoharjo (Setyaningsih & Gutama, 2016). Kajian ini melihat penyandang disabilitas dari sisi psikologi, sosial dan ekonomi dengan menggunakan landasan teori dari Talcott Parson dalam konsep struktural fungsional (Zainina, 2020). Hasil temuan penelitian melihat persepsi masyarakat tentang penyandang disabilitas netra yang masih negatif (meremehkan). Keterbatasan fisik yang dimiliki oleh penyandang disabilitas netra menjadi untuk ukuran melihat kelemahan. Persepsi tersebut berpengaruh pada kepercayaan yang diberikan kepada penyandang disabilitas netra, terutama dalam dunia kerja. Kondisi ini mengakibatkan penyandang disabilitas netra belum mendapatkan akses ekonomi yang dapat mendukung penghidupan yang layak.

Penerimaan positif dari masyarakat dibutuhkan, mengingat adanya penerimaan dari lingkungan menjelaskan bahwa semua orang memiliki keunikan dan mempunyai hak untuk memiliki kehidupan yang lebih layak. Dengan mempekerjakan disabilitas netra berdasarkan atas kemampuan yang dimiliki bukan karena belas kasihan. Disabilitas netra juga perlu diperhatikan haknya untuk mendapatkan kesempatan bekerja. Penerimaan disabilitas netra tidak lagi berdasarkan pada belas kasihan namun lebih ditekankan pada hak dan kemampuan yang dimiliki oleh disabilitas netra.

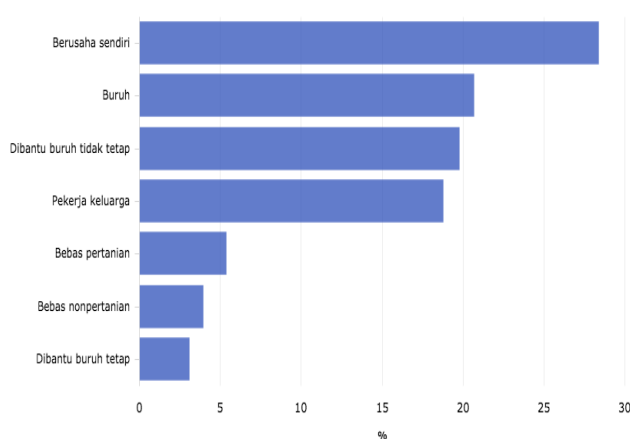
Namun dalam kondisi kompetisi di dunia kerja, penyandang disabilitas netra belum mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi karena sangat minim berhubungan dengan pemerintah, terutama dalam mengakses program yang disediakan untuk disabilitas netra (Fauziyah, 2018). Sehingga program untuk penyandang disabilitas netra belum terserap optimal. Kondisi ini juga didukung dengan masih adanya persepsi masyarakat yang melihat disabilitas netra sebagai objek penerima program. Untuk itu pemerintah

perlu menyiapkan program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas netra secara kontinyu dan berkelanjutan yang mendorong kemandirian disabilitas netra.

Selain program dan kesempatan, disabilitas netra juga membutuhkan dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat sangat dibutuhkan dalam memberikan rasa aman dan juga penghargaan melalui penerimaan terhadap disabilitas netra dengan baik (Rosalina & Apsari, 2020). Masyarakat juga diharapkan mempunyai penerimaan yang diwujudkan dengan selalu melibatkan disabilitas netra dalam setiap kegiatan dan aktivitas sehari-hari. Kondisi ini akan dapat mengurangi penerimaan yang negatif dari masyarakat yang masih belum memahami posisi disabilitas netra dengan baik.

Berdasarkan data BPS, (6 Juli 2021) dijelaskan bahwa keberadaan penyandang disabilitas kurang mendapatkan kesempatan yang sama dalam pekerjaan. Terdapat 265.500 jiwa atau 1,18 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja pada Tahun 2020 dan mengalami penurunan 0,1 poin dari tahun sebelumnya.

Kondisi disabilitas dalam penerimaannya di dunia kerja, menggambarkan bahwa posisi disabilitas netra dalam hal ini masih membutuhkan dukungan yang kuat dari komunitas, lingkungan, serta pemerintah dan dunia usaha.



**Bagan 2.** Penduduk Bekerja dengan Disabilitas Menurut Status Pekerjaan (2020)

Sumber: Katadata.co.id

Berdasarkan laporan dari Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa selama tahun 2021 terdapat 5.825 penyandang disabilitas bisa bekerja dengan layak. Jumlah ini meliputi 1.271 penyandang disabilitas telah bekerja di 72 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 4.554 penyandang disabilitas telah bekerja di 588 perusahaan swasta. Jumlah tersebut masih sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia yang diperkirakan mencapai 16,5 juta, terdiri dari 7,6 juta laki-laki dan 8,9 juta perempuan (Kristianus, n.d.). Program-program yang mendukung hadirnya disabilitas netra di ruang publik khususnya di dunia kerja sangat dibutuhkan untuk mendukung naiknya angka penerimaan disabilitas netra di dunia kerja (Rendy Rachman, Prof. Dr. Janianton Damanik., 2017).

### Motivasi Berdaya Saing dan Jejaring Usaha Bagi Disabilitas Netra

Membangun penyandang disabilitas netra yang mandiri bukan hal yang mudah. Faktor utama kesuksesan kemandirian penyandang disabilitas netra adalah motivasi dan semangat tinggi untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Memotivasi diri menjadi hal utama dalam konsep pemberdayaan.

Kegiatan positif dalam menguatkan motivasi adalah melalui *sharing* dengan sesama disabilitas netra. Selain itu, penting adanya dukungan keluarga dan lingkungan sekitar. Dalam kondisi inilah, sosialisasi terhadap masyarakat sekitar atau lingkungan eksternal untuk dapat menerima keberadaan disabilitas netra menjadi penting. Menerima bukan bermakna mengasihani. Namun menerima dalam hal ini adalah menempatkan penyandang disabilitas sesuai dengan porsi yang wajar.

Upaya pemberdayaan untuk mendorong kemandirian disabilitas netra akan dapat terwujud dengan dukungan masyarakat (lingkungan

eksternal) dan keluarga (lingkungan internal) (Pravitasari et al., 2014). Kemampuan penyandang disabilitas dalam menerima kondisi yang ada pada dirinya menjadi kunci kesuksesan untuk mandiri. Kemandirian yang dibangun tersebut akan mampu mendorong penyandang disabilitas untuk tampil dan mendapatkan kesetaraan secara ekonomi. Karena mereka mampu menempatkan posisinya dalam porsi yang sesuai dengan kemampuan.

Keterbukaan dunia usaha dan dunia kerja lainnya menjadi faktor penting yang dapat mendukung ketercapaian kesetaraan ekonomi bagi penyandang disabilitas. Keterbatasan fisik yang dimiliki, harus mendapatkan dukung regulasi dan penerimaan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan disabilitas netra (Waruwu & Adhi, 2019). Dengan dukungan tersebut penyandang disabilitas netra akan mampu bangkit dan mandiri.

Untuk keberhasilan program pemberdayaan disabilitas netra dalam bidang ekonomi, penting untuk membangun jejaring sesama pelaku usaha disabilitas dengan mengenalkan produk dan jasa yang mereka miliki untuk dapat di kenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Dalam dunia usaha faktor promosi dan komunikasi menjadi hal penting untuk mengenalkan jasa serta produk barang yang dimiliki. Media sosial saat ini menjadi alat vital untuk berwirausaha. Komunikasi merupakan hal penting bagi pengusaha dalam sebuah wirausaha atau bisnis. Komunikasi yang baik akan menentukan kesuksesan proses kewirausahaan. Komunikasi yang dilakukan oleh seorang pengusaha tidak hanya seni berbicara saja, komunikasi dapat dilakukan melalui berbagai media seperti papan iklan, slogan, lambang, gambar, video iklan, dan komunikasi verbal lainnya. Pesan yang disampaikan melalui media tersebut bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai produk yang dijual dalam bisnisnya. Setiap bisnis membutuhkan alat

atau instrumen yang berbeda. Semua tergantung dengan usaha apa yang sedang dijalankan.

Media sosial sebagai media baru dalam berinteraksi dan bersosialisasi memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap berbagai aspek kehidupan baik positif atau negatif. Salah satu aspek positif dari media sosial adalah mampu digunakan untuk promosi dan penjualan bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil. Para pelaku usaha yang menggunakan media sosial, merasa bahwa media sosial telah menunjang usahanya, terutama untuk promosi dan penjualan.

### **Strategi Penguatan Keberdayaan Disabilitas Dalam Pemenuhan Hak Kesetaraan ekonomi**

Untuk membangun kemandirian dan keberdayaan penyandang disabilitas, perlu memperhatikan beberapa hal; konsisten, berani inovasi, kreatif, memperhatikan dan pelanggan (UMJ, 2021).

**Konsistensi**, konsisten sangat dibutuhkan dalam segala hal. perlu terus dikembangkan secara konsistensi yang sudah berjalan dan mencari jalan keluar dari setiap permasalahan, kembangkan sistem komunikasi baik dari Instagram, Facebook, Tiktok dan media sosial lainnya agar dapat memancing para pelanggan secara luas dan pelanggan juga dapat mudah untuk mendapatkan info terkait usaha yang dijalankan.

**Berani inovasi**, Dalam era sekarang, kompetisi membutuhkan inovasi yang kuat. Upaya berinovasi enggan menciptakan ide-ide baru akan dapat menguatkan bisnis/usaha yang saat ini dijalankan. Dari kegiatan inovasi akan dapat diperoleh keunggulan yang dibutuhkan oleh pasar. Berani melakukan inovasi merupakan sikap yang positif didunia usaha. Keberanian mencoba dapat dilakukan dengan membuka gerai di mall atau tempat lainnya, ramuan atau racikan kopi dapat menggunakan feelings sehingga mempunyai keunggulan yang lebih. Outlet dan gerai di juga bisa dibuat di tempat lainnya.



**Kreatif**, pentingnya kreatifitas bagi usaha kecil terutama bagi penyandang disabilitas netra yang menjual jasa. Misalnya untuk produk jasa di bidang kesenian, bisa dilakukan dengan membuat suatu acara atau show melalui Zoom dengan tema yang menarik sehingga dapat menarik perhatian partisipan.

**Memperhatikan pelanggan**, dalam menjalankan usaha hal penting lainnya yaitu perlu dibuat kriteria pasien/pelanggan. Khususnya bagi disabilitas yang melayani jasa pijat perlu diperhatikan misalnya; Hanya melayani pasien/pelanggan yang sudah divaksin (dengan menunjukkan sertifikat vaksin) dan dapat menunjukkan hasil SWAB dengan keterangan negatif. Serta pemijat juga sudah memiliki sertifikat vaksin.

Selain poin penting di atas, pemberdayaan disabilitas netra juga sudah dijalankan melalui pembinaan yang dilakukan oleh Panti Rehabilitasi Sosial Bina Netra (RSBN) melalui program bimbingan fisik dan mental, bimbingan sosial, bimbingan ketrampilan, penempatan di komunitas serta pelatihan-pelatihan lanjutan yang dapat mendukung disabilitas netra untuk lebih mandiri dalam menjalani aktivitas sehari-hari (Sukmana, 2018). Poin-poin penting di atas harus dapat diakses oleh disabilitas netra.

### **Kesesuaian Program Pemberdayaan dengan Kebutuhan dan Kemampuan Disabilitas**

Kajian pemberdayaan disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas juga dilakukan dengan melakukan analisis terhadap pelaksanaan program pemberdayaan penyandang disabilitas. Kajian tersebut menggunakan analisis kebijakan publik dari David C. Korten (Rizqia & Purnaweni, 2016). Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan yang telah dilakukan mampu memberikan pengaruh kebermanfaatan bagi penyandang disabilitas. Namun masih terdapat beberapa pelatihan yang kurang sesuai dengan

kebutuhan dan kemampuan penyandang disabilitas sebiangga sehingga kurang dapat memberikan kebermanfaatan. Sehingga dibutuhkan program-program baru yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan disabilitas (Rizqia & Purnaweni, 2016).

Pelaksanaan program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas di perkotaan, melalui program pelatihan kepada penyandang disabilitas. Program yang dijalankan oleh Dinas sosial yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan peningkatan mobilitas, pelatihan peningkatan ketrampilan bagi keluarga penyandang disabilitas, dan pelatihan ekonomi kreatif.

Pelaksanaan pelatihan tersebut diharapkan mampu memberikan ketrampilan bagi penyandang disabilitas dalam mengupayakan kemandirian ekonomi keluarganya. Pelatihan mobilitas yang diberikan kepada penyandang disabilitas netra bermanfaat untuk meningkatkan kemandirian dalam melakukan mobilitas seperti menggunakan eskalator atau lift, dan kegiatan lainnya yang dijalankan oleh disabilitas netra.

### **PENUTUP**

Hadirnya penyandang disabilitas, khususnya disabilitas netra di dunia kerja perlu mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Keterserapan tenaga kerja penyandang disabilitas netra masih sedikit dibandingkan dengan jumlah penyandang disabilitas yang ada di Indonesia. Pemerintah melalui UU No 8 Tahun 2016 terus melakukan upaya untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas, sedikitnya 1-2 persen dari jumlah pegawai yang ada. Upaya tersebut juga harus di dukung dengan peran aktif dari penyandang disabilitas netra untuk mengupayakan peningkatan kompetensi dan kualitas diri supaya dapat memenuhi hak-hak ekonomi.

Dalam pemenuhan hak atas ekonomi bagi disabilitas netra ditemukan faktor-faktor penting yang perlu dilakukan untuk penguatan program pemberdayaan, faktor tersebut antara lain;

Pentingnya persepsi positif dari masyarakat umum terhadap disabilitas dalam dunia kerja, pentingnya kesesuaian program bagi disabilitas, membangun motivasi berdaya saing dan jejaring, penguatan untuk mendapatkan kesetaraan ekonomi. Dengan demikian akan terbangun jaringan disabilitas yang mendukung kegiatan usaha secara bersama-sama.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah memberikan pendanaan dalam kegiatan penelitian internal UMJ. terimakasih kepada lembaga mahasiswa *Disable Care Community* (DCC) Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah membantu penulis untuk mendapatkan data dan informasi. Terimakasih atas bantuan yang diberikan sehingga artikel ini bisa dirasakan manfaatnya

### DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2021). *Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia*,  
<https://www.bps.go.id/publication/2021/06/15/efb1f5cba486f2ebb0bab891/indikator-pasar-tenaga-kerja-indonesia-februari-2021.html>, diakses tanggal 9 Januari 2021.  
Diambil dari <https://www.bps.go.id/publication/2021/06/15/efb1f5cba486f2ebb0bab891/indikator-pasar-tenaga-kerja-indonesia-februari-2021.html>
- Dinsos Tangsel. (2018). *Data disabilitas tangsel*.  
Diambil dari <https://dinsos.tangerangselatankota.go.id>
- Fauziyah, D. F. (2018). *Perlindungan Hukum Anak Disabilitas di tangerang Selatan*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Diambil dari [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40954/1/DINDA\\_FARAH\\_FAUZIYAH-FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40954/1/DINDA_FARAH_FAUZIYAH-FSH.pdf)
- Hadi, A. P. (2015). Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangunan. *Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya*, (1987), 1–14.  
Diambil dari [https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=2KbcISwAAAJ&citation\\_for\\_view=2KbcISwAAAJ:YsMSGGLbcyi4C](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=2KbcISwAAAJ&citation_for_view=2KbcISwAAAJ:YsMSGGLbcyi4C)
- Istifarroh, I., & Nugroho, W. C. (2019). Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan Di Perusahaan Swasta Dan Perusahaan Milik Negara. *Mimbar Keadilan*, 12(1), 21.  
<https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2164>
- Kristianus, A. (n.d.). 2021, Sebanyak 5.825 Penyandang Disabilitas Bekerja di BUMN dan Swasta. Diambil dari <https://investor.id/business/280133/2021-sebanyak-5825-penyandang-disabilitas-bekerja-di-bumn-dan-swasta>
- Mutia, S. F. N. (2021). *Disabilitas Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Trenggalek*. Universitas Muhammadiyah Malang. Diambil dari <https://eprints.umm.ac.id/77726/>
- Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal HAM*, 11(1), 131.  
<https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>
- Noor, M. (2018). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume I, No. 2, Juli 2011*, 1(2), 87–99.  
<https://doi.org/10.31227/osf.io/weu8z>
- Pravitasari, S. E., Soeaidy, M. S., & Hadi, M. (2014). Pemberdayaan Bagi Penyandang Tunanetra Guna Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (Studi Pada UPT

- Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 2(1), 53–59. Diambil dari <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/336>
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. (2018). *Disabilitas, Hari Disabilitas Internasional 3 Desember 2018. Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI*. Diambil dari <https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Profil-Kesehatan-indonesia-2019.pdf>
- Rendy Rachman, Prof. Dr. Janianton Damanik., M. S. (2017). Pengaruh Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Netra. Diambil dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/130963>
- Rizqia, A. N., & Purnaweni, H. (2016). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Tangerang Selatan. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 1–9. Diambil dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/viewFile/31417/25606>
- Rosalina, T. A., & Apsari, N. C. (2020). Dukungan Sosial Bagi Orang Dengan Disabilitas Netra Dalam Pencapaian Prestasi Di Sekolah Luar Biasa. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(2), 414. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i2.28486>
- Salsabila, N., Krisnani, H., & Apsari, N. C. (2019). Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), 190. <https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20496>
- Setyaningsih, R., & Gutama, T. A. (2016). Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum Difabel (Studi Kasus pada Peran Paguyuban Sehati dalam Upaya Pengembangan Kemandirian bagi Kaum Difabel di Kabupaten Sukoharjo). *Jurnal Sosiologi DILEMA*, 31(1), 42–52.
- Sugiyono, P. D. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In *Alfabeta*, cv. Diambil dari <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/8411/>
- Sukmana, O. (2018). Program Peningkatan Ketrampilan Bagi Penyandang Disabilitas Netra, (1), 10–27. Diambil dari <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/1799>
- UMJ, D. (2021). *Hasil Seminar Kewirausahaan Disabilitas Netra, 26 September 2021*. Jakarta.
- Waruwu, D., & Adhi, N. K. J. (2019). Pemberdayaan penyandang disabilitas pada objek wisata Kuta Bali. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 16(1), 51–58. <https://doi.org/10.21831/jc.v16i1.22000>
- Widinarsih, D. (2019). Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(2), 127–142. Diambil dari <http://jurnalkesos.ui.ac.id/index.php/jiks/article/view/239>
- Wulandari, C. T. (2017). *Self-Talk untuk Mencapai Penerimaan Diri Pada Penyandang Disabilitas Netra di Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Netra “Bhakti Chandrasa” Surakarta*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Diambil dari <https://fud.iain-surakarta.ac.id/akasia/repository/COVER2JAKFH.pdf>
- Yusida Imran. (n.d.). Penyandang Disabilitas di Perguruan Tinggi. *Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi*

*Muhammadiyah (APPPTM)* ISBN: 978-602-50710-9-6. Diambil dari <http://www.appptma.org/wp-content/uploads/2019/07/12.978-602-50710-9-6.pdf>

Zainina, H. A. (2020). *Kesetaraan dan Ketidakadilan Gender Pada Pedagang Perempuan Pasar ( Studi Kasus di Pasar Anyar Kelurahan Suka Asih Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten )*. *Jurnal Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah. Diambil dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/51578>